Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

PENGORGANISASIAN KOLEKSI BRAILLE DALAM MENDUKUNG AKSESIBILITAS INFORMASI

Ade Nufus[1)], Muhammad Rafli Arrasyid[2)], Asnawi[3)]
[1) 2) 3)] Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: ade.nufus@ar-raniry.ac.id

Diterima: 15/12/2025
Selesai Revisi: 21/12/2025
Diterbitkan: 30/12/2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengorganisasian koleksi braille di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) serta dampaknya terhadap aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas netra. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa DPKA memiliki 249 eksemplar koleksi braille yang seluruhnya bersumber dari hibah lembaga eksternal. Tahapan pengorganisasian koleksi meliputi inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, hingga penjajaran di rak belum dilaksanakan secara sistematis dan terstandar. Tidak ditemukan adanya katalog khusus, sistem klasifikasi yang sesuai, maupun panduan temu kembali yang ramah disabilitas. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya pemanfaatan koleksi: tidak tercatat satu pun transaksi peminjaman, dan komunitas disabilitas netra termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak pernah memanfaatkan koleksi yang tersedia. Aksesibilitas fisik seperti lift dan ruang khusus telah tersedia, tetapi absennya pengorganisasian koleksi yang baik menjadikan fasilitas tersebut tidak fungsional secara penuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengorganisasian koleksi yang memadai adalah prasyarat utama terwujudnya aksesibilitas informasi yang nyata bagi penyandang disabilitas netra.

Kata Kunci: *pengorganisasian koleksi, koleksi braille, aksesibilitas informasi*

Abstract

This study examines the organization of Braille collections at the Aceh Library and Archives Office (DPKA) and its impact on information accessibility for visually impaired persons. Using a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation, the study found that DPKA holds 249 copies of Braille collection, all sourced from external donations. The stages of collection organization including inventorying, classification, cataloguing, and shelf arrangement have not been implemented systematically or in accordance with established standards. No specialized catalog, appropriate classification scheme, or disability-friendly retrieval guide was found. This directly resulted in minimal collection use: no borrowing transactions were recorded, and the visually impaired community including students from Special Schools (SLB) had never utilized the available collection. Physical

Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

accessibility such as lifts and special rooms existed, but the absence of proper collection organization made these facilities practically non-functional. The study concludes that adequate collection organization is the primary prerequisite for meaningful information accessibility for persons with visual disabilities.
Keywords: ***collection organization, braille collection, information accessibility***

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan sebagai lembaga informasi publik memikul tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan akses ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan perpustakaan. Di tingkat internasional, *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) melalui dokumen "Library Services to People with Print Disabilities" menekankan bahwa penyandang disabilitas, termasuk disabilitas netra, memiliki hak yang sama dalam mengakses koleksi dan layanan perpustakaan.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Penyandang disabilitas netra menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses bahan bacaan dan informasi di perpustakaan umum. Hambatan tersebut tidak semata-mata bersifat fisik seperti ketiadaan *guiding block* atau lift tetapi juga bersifat teknis, yakni minimnya pengorganisasian koleksi khusus seperti koleksi braille yang memungkinkan mereka menemukan dan memanfaatkan informasi secara mandiri (Pratama et al., 2024).

Pengorganisasian koleksi merupakan serangkaian kegiatan teknis perpustakaan yang mencakup inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, hingga penjajaran fisik koleksi di rak. Kegiatan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi dari sistem temu kembali informasi yang memungkinkan pemustaka menemukan bahan yang dibutuhkan secara efisien (Bromberg, 2018). Tanpa pengorganisasian yang sistematis, koleksi yang secara fisik tersedia pun menjadi tidak dapat diakses secara fungsional.

Koleksi braille memiliki karakteristik yang berbeda dari koleksi reguler, baik dari segi fisik (ukuran lebih besar, halaman lebih tebal) maupun dari segi konten yang direpresentasikan melalui sistem titik-titik timbul. Keunikan ini menuntut pendekatan pengorganisasian yang lebih spesifik dan terstandar. Tanpa sistem inventarisasi yang rapi, klasifikasi yang tepat, dan katalog yang memadai, koleksi braille sulit ditemukan dan dimanfaatkan oleh pemustaka tunanetra yang sangat bergantung pada panduan sistematis dalam penelusuran informasi (Dzunurain & Wasisto, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh isu layanan perpustakaan bagi tunanetra, antara lain kajian tentang upaya meningkatkan keterpakaian koleksi braille di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara (Sinaga dkk, 2024), analisis ruang braille di Perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta (Khairunnisa, 2024), pengembangan audiobook sebagai alternatif akses informasi, dan kajian aksesibilitas layanan inklusif bagi tunanetra di Perpustakaan Umum Cikini Jakarta (Pratama et al., 2024). Namun, penelitian yang secara khusus menelaah tahapan pengorganisasian koleksi braille dan kaitannya dengan aksesibilitas informasi di perpustakaan umum daerah masih sangat terbatas, khususnya di Provinsi Aceh.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) sebagai perpustakaan umum provinsi diharapkan menjadi rujukan layanan inklusif di wilayahnya. DPKA telah menyediakan beberapa fasilitas fisik untuk penyandang disabilitas, termasuk ruang khusus disabilitas, lift, dan toilet yang ramah disabilitas. Akan tetapi, pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah: apakah ketersediaan koleksi braille di DPKA telah disertai dengan pengorganisasian yang memadai, dan apakah kondisi pengorganisasian tersebut berkontribusi pada atau justru menghambat aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas netra.

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Secara spesifik, penelitian

Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

ini bertujuan: (1) mendeskripsikan tahapan pengorganisasian koleksi braille yang dilaksanakan di DPKA; (2) mengidentifikasi ada atau tidaknya sistem pengorganisasian koleksi yang terstandar untuk koleksi braille; dan (3) menganalisis implikasi kondisi pengorganisasian koleksi tersebut terhadap aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas netra. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi DPKA dan perpustakaan umum daerah lainnya dalam mengembangkan layanan inklusif yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Pengorganisasian Koleksi Perpustakaan

Pengorganisasian koleksi atau yang sering pula disebut sebagai pengolahan bahan pustaka merupakan inti dari kegiatan teknis perpustakaan. (Chowdhury & Chowdhury, 2007) mendefinisikan pengorganisasian informasi sebagai proses sistematis untuk mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan mengindeks sumber informasi agar dapat ditemukan kembali secara efisien. Dalam konteks perpustakaan, proses ini diwujudkan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur.

Secara umum, kegiatan pengorganisasian koleksi perpustakaan terdiri atas empat tahapan pokok. Pertama, inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan setiap koleksi yang masuk ke perpustakaan ke dalam buku induk atau pangkalan data, disertai pemberian stempel kepemilikan sebagai penanda legalitas koleksi (Rathod, 2025). Kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan koleksi berdasarkan subjek atau isi menggunakan skema tertentu, yang paling umum dipakai adalah *Dewey Decimal Classification* (DDC). Tujuan klasifikasi adalah menempatkan koleksi yang subjeknya sama atau berdekatan dalam lokasi fisik yang berdekatan pula di rak, sehingga memudahkan penelusuran. Ketiga, katalogisasi, yaitu proses pembuatan deskripsi bibliografis yang merekam informasi identitas setiap koleksi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan data fisik lainnya sehingga dapat ditelusur melalui katalog, baik manual maupun digital (OPAC). Keempat, shelving atau penjajaran, yaitu penyusunan fisik koleksi di rak berdasarkan nomor panggil yang telah ditetapkan pada tahap klasifikasi dan katalogisasi (Hjørland, 2025).

Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kegagalan pada satu tahap akan berdampak pada tahap berikutnya dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan pemustaka dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan. Pengorganisasian koleksi yang baik bukan hanya membantu pemustaka, tetapi juga mempermudah kerja pustakawan dalam melakukan stock opname, evaluasi koleksi, dan pemeliharaan.

b. Karakteristik dan Pengorganisasian Koleksi Braille

Koleksi braille adalah bahan pustaka yang menggunakan sistem huruf timbul yang dikembangkan oleh Louis Braille pada abad ke-19, dirancang khusus agar dapat dibaca melalui sentuhan jari oleh penyandang disabilitas netra. Secara fisik, koleksi braille memiliki karakteristik yang berbeda dari koleksi cetak biasa: ukurannya lebih besar (umumnya A4 atau lebih), halamannya lebih tebal karena tekanan timbul titik-titik braille, dan sebuah judul buku yang relatif tipis dalam cetakan biasa dapat menjadi beberapa jilid tebal dalam format braille (Nielsen & Irvall, 2001).

Keunikan fisik ini berimplikasi langsung pada cara pengorganisasiannya. Pengorganisasian koleksi braille pada dasarnya mengikuti alur yang sama dengan koleksi reguler dimulai dari inventarisasi, lalu klasifikasi dan katalogisasi, hingga penjajaran di rak namun memerlukan pertimbangan khusus terkait kebutuhan format dan temu kembali yang ramah tunanetra (Rezkia et al., 2023). Sistem klasifikasi seperti DDC tetap dapat diterapkan, tetapi label dan penanda pada rak perlu menggunakan huruf braille agar pengguna tunanetra dapat melakukan penelusuran mandiri.

Selain koleksi braille cetak, perpustakaan inklusif juga lazim mengelola koleksi

Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

pendukung seperti audiobook, e-book dengan screen reader, dan majalah braille. Pengembangan audiobook dalam perpustakaan digital, misalnya, dapat dilakukan melalui proses perekaman narasi atau konversi teks-ke-suara (text-to-speech), dan masing-masing format ini juga memerlukan pengorganisasian yang sistematis agar dapat ditelusur dan dimanfaatkan. Standar IFLA menegaskan bahwa koleksi bagi penyandang disabilitas harus tersedia dalam beragam format, terorganisir dengan baik, dan dapat diakses baik secara fisik maupun digital (Nielsen & Irvall, 2001).

c. Aksesibilitas Informasi bagi Penyandang Disabilitas Netra

Aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas netra mencakup dua dimensi yang saling melengkapi: aksesibilitas fisik, yakni kemudahan menjangkau ruang dan fasilitas perpustakaan, serta aksesibilitas intelektual, yakni kemudahan menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi dalam koleksi (Pratama et al., 2024). Keduanya harus terpenuhi sekaligus, aksesibilitas fisik yang baik tanpa aksesibilitas intelektual tidak akan menjadikan perpustakaan benar-benar inklusif.

Penelitian tentang peran Perpustakaan Yayasan Mitra Netra menunjukkan bahwa perpustakaan yang benar-benar melayani tunanetra tidak hanya menyediakan koleksi dalam format yang sesuai, tetapi juga mengelolanya secara sistematis, menyelenggarakan program pendidikan pengguna (user education), dan menyediakan teknologi pendukung seperti audiobook player dan screen reader (Fitriyani & Azwar, 2025). Tanpa pengelolaan koleksi yang baik, keberadaan fisik koleksi braille pun tidak otomatis berarti akses yang bermakna bagi penggunanya.

Di sisi lain, rendahnya pemanfaatan koleksi braille di berbagai perpustakaan umum daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, antara lain minimnya sosialisasi dan promosi layanan, ketiadaan kerja sama dengan lembaga pendidikan khusus (SLB) atau yayasan disabilitas, serta tidak adanya program literasi inklusif yang melibatkan komunitas tunanetra secara aktif (Harcourt & State, 2024). Pengorganisasian koleksi yang baik perlu diikuti dengan strategi layanan dan promosi yang tepat sasaran agar koleksi benar-benar sampai kepada pemustaka yang membutuhkannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang kondisi pengorganisasian koleksi braille dan dampaknya terhadap aksesibilitas informasi, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui data kuantitatif semata (Doyle et al., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang terdiri dari pustakawan di unit pengolahan bahan pustaka, pustakawan unit layanan disabilitas, guru di SLB dan siswa penyandang disabilitas netra di SLB tersebut yang terdata pernah mengunjungi perpustakaan. Kedua, observasi langsung terhadap kondisi fisik koleksi braille, fasilitas penyimpanan, dan sistem pengorganisasian yang ada di DPKA. Ketiga, dokumentasi berupa pencatatan data koleksi, foto kondisi koleksi dan ruangan, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan relevansi posisi dan pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti (Lenaini et al., 2021). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai informan dan sumber yang berbeda.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

a. Ketersediaan Koleksi Braille di DPKA

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, DPKA memiliki koleksi braille dalam lima jenis: buku braille, Alquran braille, majalah braille, audiobook dalam format kaset, dan aplikasi screen reader (60 keping CD). Jumlah koleksi buku braille tercatat sebanyak 249 eksemplar, dengan catatan bahwa seluruh koleksi tersebut diperoleh melalui jalur hibah dari tiga lembaga, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Sosial, dan Yayasan Abiyoso Bandung. Tidak ditemukan adanya pengadaan koleksi braille yang diinisiasi secara mandiri oleh DPKA sejak perpustakaan ini berdiri hingga saat penelitian dilakukan (2025), sebagaimana data koleksi yang diuraikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Ketersediaan Koleksi Braille di DPKA

No.	Kategori Koleksi	Jumlah	Sumber Penyediaan
1	Buku Braille	249 eksemplar	1. Perpusnas RI 2. Kemensos 3. Yayasan Abiyoso
2	Alquran Braille		
3	Majalah Braille		
4	Audiobook (kaset)	Ada (belum ada rak)	
5	Aplikasi Screen Reader (CD)	60 keping	

Sumber: Data Diolah dari hasil wawancara, 2025

Ketergantungan penuh pada hibah tanpa pengadaan mandiri menyebabkan koleksi yang dimiliki DPKA bersifat pasif dan tidak terencana. Kondisi ini berimplikasi pada kemutakhiran koleksi yang rendah, tidak ada mekanisme seleksi berbasis kebutuhan pengguna, tidak ada pembaruan berkala, dan tidak ada evaluasi relevansi koleksi. Standar IFLA mensyaratkan bahwa koleksi untuk penyandang disabilitas harus memenuhi prinsip keberlanjutan, relevansi, dan keterjangkauan yang didasarkan pada analisis kebutuhan pengguna (Nielsen & Irvall, 2001). Dengan kondisi yang ada, DPKA belum memenuhi satupun dari ketiga prinsip tersebut secara optimal.

Di samping itu, ditemukan pula persoalan kualitas fisik koleksi. Sebagian buku braille yang tersimpan mengalami kerusakan akibat serangan rayap, yang mengindikasikan lemahnya sistem preservasi dan perawatan koleksi. Kondisi ini semakin mempersempit jumlah koleksi yang layak dan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka tunanetra.

b. Tahapan Pengorganisasian Koleksi Braille di DPKA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian koleksi braille di DPKA belum berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Dari empat tahapan pokok pengorganisasian koleksi inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan shelving tidak satu pun yang dilaksanakan secara sistematis dan terstandar untuk koleksi braille.

Pada aspek inventarisasi, pencatatan koleksi braille dilakukan secara manual dan tidak konsisten. Tidak ditemukan buku induk khusus koleksi braille yang terisi lengkap. Data jumlah koleksi yang dapat dikonfirmasi pun bersumber dari catatan penerimaan hibah, bukan dari proses inventarisasi yang terstruktur. Kondisi ini membuat DPKA tidak memiliki gambaran akurat tentang jumlah, kondisi, dan distribusi koleksi braille yang dimilikinya. Penelitian di SLB-ABCD Muhammadiyah Palu memberikan kontras yang jelas: inventarisasi koleksi braille, meskipun sederhana, dilakukan dengan mencatat setiap item masuk, memeriksa kesesuaian fisik, dan memberikan cap kepemilikan sebelum koleksi diproses lebih lanjut (Rezkia et al., 2023).

Pada aspek klasifikasi, koleksi braille di DPKA tidak memiliki nomor klasifikasi yang diaplikasikan secara konsisten. Penanganan nomor klasifikasi dilakukan oleh bagian pengolahan bahan pustaka umum, tanpa panduan khusus yang disesuaikan

Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

dengan karakteristik koleksi braille. Mengacu pada *Dewey Decimal Classification* (DDC) yang menjadi standar internasional dan banyak digunakan perpustakaan di Indonesia, setiap koleksi seharusnya mendapatkan nomor kelas yang mencerminkan subjek kontennya. Tanpa nomor klasifikasi yang tepat, koleksi braille tidak dapat disusun secara sistematis di rak, dan pemustaka terutama pemustaka tunanetra yang bergantung pada panduan sistemati tidak dapat menemukan koleksi yang relevan secara mandiri.

Pada aspek katalogisasi, tidak ditemukan adanya katalog khusus untuk koleksi braille, baik dalam format manual maupun digital. Koleksi braille belum dimasukkan ke dalam sistem otomasi perpustakaan (INLISLite) yang digunakan DPKA, sehingga tidak dapat ditelusur melalui OPAC. Ketiadaan katalog ini menjadi hambatan terbesar bagi aksesibilitas intelektual, karena tanpa katalog, pemustaka tidak dapat mengetahui koleksi apa yang tersedia, bagaimana kondisinya, dan di mana lokasinya. (Fitriyani & Azwar, 2025) Proses katalogisasi yang baik seharusnya mencakup input data bibliografi yang mencakup judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, klasifikasi, nomor panggil, dan subjek ke dalam sistem yang dapat ditelusur oleh pemustaka.

Pada aspek shelving atau penjajaran, koleksi braille memang telah ditempatkan dalam ruang khusus disabilitas. Namun penyusunannya belum mengikuti urutan nomor panggil atau sistem tertentu yang memungkinkan penelusuran mandiri. Audiobook dalam format kaset bahkan belum mendapatkan rak khusus sehingga belum dapat disajikan kepada pemustaka. Label-label pada rak pun tidak menggunakan huruf braille, yang merupakan keharusan dasar bagi perpustakaan yang ingin melayani tunanetra secara mandiri. Berikut uraian tahapan pengorganisasian koleksi di DPKA, pada tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Tahapan Pengorganisasian Koleksi Braille di DPKA

No.	Tahapan	Status	Keterangan
1	Inventarisasi	Tidak sistematis	Pencatatan manual tidak konsisten; tidak ada buku induk khusus braille
2	Klasifikasi	Tidak terstandar	Tidak ada nomor DDC yang diaplikasikan secara konsisten; tidak ada panduan khusus
3	Katalogisasi	Belum ada	Tidak ada katalog khusus braille; koleksi belum diinput ke INLISLite/OPAC
4	Shelving/Penjajaran	Sebagian	Ditempatkan di ruang khusus namun tidak menggunakan nomor panggil; label rak tidak berbahasa braille

Sumber: Data Diolah, 2025

c. Dampak Pengorganisasian terhadap Aksesibilitas Informasi

Kondisi pengorganisasian koleksi yang tidak sistematis berimplikasi langsung dan signifikan terhadap aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas netra di DPKA. Aksesibilitas informasi, sebagaimana dikemukakan Pratama, Sinaga dan Khadijah (2024), mencakup dua dimensi: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas intelektual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aksesibilitas fisik sebagian sudah tersedia berupa lift, ruang baca, dan toilet khusus disabilitas aksesibilitas intelektual hampir tidak terpenuhi sama sekali.

Absennya katalog dan sistem temu kembali yang memadai menjadikan koleksi braille yang tersedia di rak tidak dapat ditemukan secara sistematis oleh siapapun, termasuk oleh petugas perpustakaan sendiri. Pemustaka tunanetra yang bergantung sepenuhnya pada panduan dan informasi yang dapat diakses melalui indera non-visual tentu menghadapi hambatan yang jauh lebih besar. Situasi ini sejalan dengan temuan Nisrina dan Azwar (2025) bahwa aksesibilitas informasi bagi tunanetra sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan koleksi aksesibel, bukan semata-mata oleh ketersediaan fisik koleksi itu sendiri.

Indonesian Journal of Library and Information Science
E- SSN: 2747-2140, P-ISSN: 2747-2132
Volume 6. No.2 (2025)
Doi: 10.22373/ijlis.v6i2.10569

Data peminjaman koleksi braille mencerminkan situasi ini secara kuantitatif: tidak tercatat satu pun transaksi peminjaman koleksi braille. Kondisi koleksi di rak tidak berubah dari waktu ke waktu tidak ada koleksi yang berpindah tempat, tidak ada catatan penggunaan di tempat (in-house use), dan tidak ada kunjungan rutin dari komunitas disabilitas netra. Siswa dari salah satu SLB dengan jarak akses tidak jauh pun mengakui tidak pernah mengunjungi DPKA untuk tujuan pemanfaatan koleksi braille, sebagaimana dirangkum dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Pemanfaatan Koleksi Braille di DPKA

No.	Indikator	Kondisi
1	Frekuensi penggunaan	Tidak ada; koleksi tidak berpindah posisi di rak
2	Perputaran koleksi	Tidak ada catatan peminjaman atau pengembalian
3	Peminjaman per kapita	Tidak ada data
4	Kepuasan pengguna	Tidak dapat diukur; tidak ada pengguna aktif
5	Aksesibilitas fisik	Sebagian terpenuhi (lift, ruang, toilet); guiding block belum ada
6	Aksesibilitas intelektual	Tidak terpenuhi; tidak ada katalog, tidak ada sistem temu kembali braille

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari sisi kebijakan, tidak ditemukan adanya regulasi internal DPKA yang secara spesifik mengatur pengelolaan koleksi braille, standar layanan bagi pemustaka disabilitas, maupun program kerja sama kelembagaan dengan SLB atau yayasan disabilitas netra. Kekosongan kebijakan ini menjelaskan mengapa persoalan pengorganisasian koleksi braille belum pernah ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Temuan ini berkorespondensi dengan standar IFLA yang menggarisbawahi tiga aspek kunci layanan koleksi bagi disabilitas: jenis koleksi yang beragam, kualitas layanan, dan aksesibilitas (Nielsen & Irvall, 2001). Dari ketiga aspek ini, DPKA baru memenuhi sebagian kecil dari aspek jenis koleksi (5 jenis koleksi tersedia), sementara aspek layanan dan aksesibilitas intelektual belum terpenuhi. Kondisi DPKA masih harus menyesuaikan dengan standar layanan perpustakaan inklusif yang ideal.

5. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa pengorganisasian koleksi braille di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh belum dilaksanakan secara sistematis dan terstandar. Dari empat tahapan pokok pengorganisasian koleksi inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan shelving tidak satu pun yang berjalan dengan baik untuk koleksi braille. Inventarisasi dilakukan secara manual dan tidak konsisten, sistem klasifikasi tidak diterapkan secara konsisten, katalog koleksi braille tidak ada, dan penjajaran di rak tidak menggunakan nomor panggil yang terstruktur.

Kekosongan pengorganisasian ini berdampak langsung pada aksesibilitas informasi. Meskipun DPKA telah memiliki 249 eksemplar koleksi braille dalam lima jenis, koleksi tersebut secara praktis tidak dapat diakses secara intelektual oleh siapapun. Tidak ditemukan satu pun transaksi peminjaman, tidak ada kunjungan rutin dari komunitas disabilitas netra, dan siswa SLB di sekitar DPKA tidak mengenal layanan koleksi braille yang tersedia. Aksesibilitas fisik yang sebagian telah disediakan lift, ruang khusus, toilet disabilitas menjadi tidak bermakna penuh tanpa aksesibilitas intelektual yang diwujudkan melalui pengorganisasian koleksi yang baik.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pengorganisasian koleksi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan prasyarat dasar terwujudnya fungsi perpustakaan sebagai

ruang informasi yang inklusif. Koleksi yang tidak terorganisir sama saja dengan koleksi yang tidak ada bagi pemustaka yang membutuhkannya. Oleh karena itu, DPKA perlu segera mengambil langkah konkret: membangun sistem inventarisasi dan katalog khusus koleksi braille, menerapkan skema klasifikasi yang dilengkapi label braille pada rak, mengintegrasikan data koleksi braille ke dalam INLISLite/OPAC, menetapkan kebijakan internal layanan inklusif, dan membangun kerja sama aktif dengan SLB dan komunitas disabilitas netra di Aceh.

Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kajian lanjutan yang mengukur dampak program pengorganisasian koleksi braille secara *before-after study*, serta pengembangan model pengelolaan koleksi inklusif yang dapat diadaptasi oleh perpustakaan umum daerah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bromberg, C. (2018). *History of science : the problem of cataloging , knowledge indexing and information retrieval in the digital space*. *July 2017*, 41–55.

Chowdhury, G. G., & Chowdhury, S. (2007). *Organizing Information from the shelf to the web*. Facet Publishing, 1-225.

Doyle, L., Mccabe, C., Keogh, B., Brady, A., & Mccann, M. (2020). *An overview of the qualitative descriptive design within nursing research*, 444-455. https://doi.org/10.1177/1744987119880234.

Dzunurain, M. K., & Wasisto, J. (2022). *Available Online at : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva Pemanfaatan Koleksi Buku Braille Sebagai Sumber Informasi Siswa Penyandang Tunanetra di Sekolah Luar Biasa Bagian A Negeri Semarang Abstrak*. *6*(1), 57–68.

Fitriyani, N., & Azwar, M. (2025). *TIK Ilmeu*. *9*(1), 174-190. https://doi.org/10.29240/tik.v9i1.12401.

Harcourt, P., & State, R. (2024). *Article published on boldscholar.com. Verify this document by clicking here*. *7*(1), 1-11.

Hjørland, B. (2025). *Dewey Decimal Classification (DDC)*. *Ddc*, 1–78.

Khairunnisa, T. (2024). *Ruang Braille Sebagai Penyedia Koleksi Bagi*. *3*(01), 1–9.

Lenaini, I., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive* dan snowball sampling. *6*(1), 33–39.

Nielsen, G. S., & Irvall, B. (2001). *Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia Acknowledgments* (Nomor 70). IFLA, 1-33

Pratama, B. A., Sinaga, D., & Khadijah, U. L. S. (2024). Peran pustakawan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan inklusif bagi pemustaka tunanetra di Perpustakaan Umum Cikini Jakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(04), 31-38.

Rathod, M. S. G. (2025). *Toward Standardized and Technologically Enabled Library Inventory Management : Bridging Policy , Practice , and Innovation*. *11*(3), 147–162. https://doi.org/10.26761/IJRLS.11.3.2025.1925

Rezkia, S., Solihin, I., Ilmu, J., Islam, I., Ushuluddin, F., & Dakwah, A. (2023). *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Koleksi Braille di SLB- ABCD Muhammadiyah Palu*. *2*(2), 106–116.